

## **PENYUSUNAN INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

**Yuhanin Zamrodah**

[yuhaninzamrodah@gmail.com](mailto:yuhaninzamrodah@gmail.com)

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Islam Balitar, Blitar

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dengan judul Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo. Tujuan Penelitian ini antara lain agar tersedianya data bagi dinas/instansi terkait untuk mengatur kebijakan ketahanan pangan di wilayah, khususnya di wilayah yang sangat rentan pangan dan memberikan formulasi kebijakan dan program aksi penanggulangan rentan pangan untuk pemantauan standar pelayanan minimal untuk bidang pelayanan kerentanan pangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis terhadap data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang diolah untuk menggambarkan suatu kondisi penelitian tanpa bermaksud menguji hipotesis. Beberapa metode analisis yang akan diterapkan didalamnya yaitu Analisis SWOT, Analisis manajemen strategis untuk menyusun rencana perusahaan dan rencana tindak.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo tahun 2020 mencapai 71,19 yang menunjukkan sudah melebihi IKP Nasional tahun 2019 yaitu 54,8 dan juga lebih tinggi dari IKP Jawa Timur tahun 2019 yaitu 62,2. Indikator-indikator yang masih rendah (sangat rentan dan di Kabupaten Probolinggo adalah aspek akses pangan yaitu KK miskin. Hasil identifikasi dan pemetaan IKP tingkat Kecamatan Bantaran masuk kategori agak rentan. Hal ini disebabkan rasio luas baku sawah dan lahan yang agak rentan, penyedia sarana dan prasarana pangan yang masih kurang (rentan), rumah tangga miskin (sangat rentan).

**Kata kunci : Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kebijakan.**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi dan untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah serta faktor-faktor pendukungnya telah dikembangkan beberapa indikator pendukungnya dalam bentuk indeks ketahanan pangan. Indeks ketahanan pangan (IKP) yang digunakan mengacu pada IKP yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian yang telah dilakukan penyesuaian dari tahun 2019 dan 2020.

Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo penting untuk dilakukan untuk mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan serta mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi, sehingga saat Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan intervensi program dan kebijakan lebih fokus dan tepat sasaran.

### **Rumusan Masalah**

1. Mengitung Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo
2. Merumuskan kebijakan dan program aksi ketahanan pangan dan penanggulangan rentan pangan di wilayah yang terkategori rentan pangan.

### **Tujuan Analisis**

Berkaitan dengan tujuan Pengukuran Indeks Ketahanan Pangan yang sudah diuraikan dimuka, disini ada beberapa sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Tersedianya data bagi dinas/instansi terkait untuk mengatur kebijakan ketahanan pangan di wilayah, khususnya di wilayah yang sangat rentan pangan;
2. Terformulasinya kebijakan dan program aksi penanggulangan rentan pangan untuk pemantauan standar pelayanan minimal untuk bidang Pelayanan Kerentanan Pangan;

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Ketahanan Pangan**

Berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Perbedaan mendasar dari dua definisi “ketahanan pangan” tersebut adalah: pada UU No 8/2012 menekankan pada ketersediaan, rumah tangga dan kualitas (mutu) pangan.

Masalah ketahanan pangan tidaklah sederhana, melainkan merupakan masalah yang kompleksitas yang terdiri dari empat aspek antara lain: 1) aspek penyediaan jumlah pangan yang cukup untuk memenuhi permintaan pangan yang meningkat karena pertumbuhan penduduk, perubahan komposisi penduduk maupun akibat peningkatan penduduk, 2) aspek pemenuhan tuntutan kualitas dan keanekaragaman bahan pangan untuk mengantisipasi perubahan preferensi konsumen yang semakin peduli pada masalah kesehatan dan kebugaran, 3) aspek tentang pendistribusian bahan-bahan pangan pada ruang dan waktu dan 4) aspek keterjangkauan pangan (food accessibility) yaitu ketersediaan bahan pangan (jumlah, kualitas, ruang dan waktu) harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

### **Indikator Ketahanan Pangan**

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan beberapa indikator ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi, tersebar di dalam tiga kelompok tersebut.

Identifikasi dan pemetaan wilayah rentan pangan pada umumnya bertujuan untuk mengetahui situasi pangan wilayah agar dapat dilakukan tindakan intervensi dan penanganan daerah yang termasuk kategori rentan pangan. Identifikasi wilayah rentan pangan terkait dengan upaya mengidentifikasi dan menentukan atau menghitung jumlah penduduk yang rentan pangan di suatu wilayah.

Menurut FAO (2000) kebanyakan sistem monitoring ketahanan pangan yang diterapkan terdiri dari empat pilar utama yaitu :

1. Agricultural Production Monitoring (APM), umumnya dikombinasikan dengan monitoring terhadap produk peternakan.
2. The Market Information System (MIS) biasanya digunakan untuk memonitor perdagangan domestik dan terkadang untuk perdagangan internasional (impor/ekspor)
3. The Social Monitoring of Vulnerable Group (MVG) atau pemantauan terhadap kelompok masyarakat rentan pangan (kronis, siklus, dan transien)
4. Food and Nutrition Surveillance System (NFSS) atau yang dikenal dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Namun dari keempat sistem monitoring ketahanan pangan tersebut masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain: 1) lemahnya organisasi, 2) penetapan tujuan yang kurang jelas dan 3) hambatan fungsional (sering ditemukan pada beberapa sistem di negara-negara sedang berkembang) (FAO, 2000).

Starchy Staple Food Ratio (SSR) merupakan salah satu indikator yang direkomendasikan oleh FAO untuk memantau situasi ketahanan pangan. SSR adalah kontribusi energi dari pangan berpati (sereal dan umbi-umbian) terhadap total asupan energi. Untuk dapat menggunakan SSR diperlukan data konsumsi atau ketersediaan pangan. Proxy indikator dikembangkan untuk menanggulangi keterbatasan yang dapat dijumpai di lapangan dalam operasionalisasi pengukuran ketahanan pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis keeratan hubungan (korelasi) antara data/informasi yang tersedia.

Menurut Anonim (2002) bahwa indikator yang akan dikembangkan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) sederhana dan mudah dipantau dengan data yang sudah biasa dikumpulkan dengan format laporan yang sudah ada, 2) mudah dianalisis oleh petugas lapangan, 3) sensitive terhadap perubahan situasi yang dapat menyebabkan ketidaktahanan pangan suatu wilayah dan 4) merupakan isyarat dini dalam pelaksanaan SKPG.

Maxwell dan Frenkenberger (1992) membagi indikator ketahanan pangan ke dalam dua kelompok secara rinci yaitu indikator proses dan indikator hasil. Indikator proses (process indicators) mencerminkan derajat kerentanan karena faktor ketersediaan pangan diantaranya adalah data meteorology, informasi sumberdaya alam, data produksi pertanian, model agro-ekologi, Neraca Bahan Makanan (NBM), informasi sebaran hama penyakit tanaman, struktur pasar dan kelembagaan penunjang.

Indikator hasil (outcome indicators) merupakan proksi dari konsumsi pangan. Indikator ini terdiri dari atas indikator langsung (direct indicators) dan tidak langsung (indirect indicators). Termasuk dalam indikator langsung adalah survei anggaran belanja dan konsumsi rumah tangga, persepsi rumah tangga terhadap ketahanan pangan dan frekuensi pangan. Adapun kategori indikator tidak langsung antara lain adalah mencakup kajian tentang simpanan (cadangan) pangan, rasio subsisten dan status gizi.

Kondisi rentan pangan dapat disebabkan karena: (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerentanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli

masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Pelayanan penanganan Kerentanan pangan adalah jenis pelayanan terkait dengan:

1. Pengembangan sistem isyarat dini
2. Penguatan kelembagaan untuk penanganan rentan pangan;
3. Pencegahan Kerentanan pangan;
4. Penanggulangan Kerentanan pangan;
5. Peningkatan dan pengembangan desa/kelurahan mandiri pangan;

Kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) Hasil review terhadap pemetaan wilayah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) Tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) Keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) Ketersediaan data di seluruh desa. Dengan pertimbangan tersebut, maka indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten sebanyak enam indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan (Tabel 2.1.).

Berkaitan dengan indikator ketahanan pangan, telah dikembangkan indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) oleh WFP (World Food Program).

#### Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten

Indikator	Definisi	Sumber Data
<b>A.Aspek Ketersediaan Pangan</b>		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan dengan luas wilayah desa	*Pusat Data dan Informasi, Kementan 2018/2019 *Dinas Pertanian *Luas wilayah desa, BPS *Dinas Kependudukan
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dibandingkan dengan jumlah rumah tangga desa	*Potensi Desa (Podes) 2019, BPS *Dinas Perdagangan *Jumlah Rumah Tangga 2019 dari Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 *Dinas Kependudukan
<b>B.Aspek Akses terhadap Pangan</b>		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1 dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa	*Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos 2019 *Dinas Sosial *Jumlah Rumah Tangga 2019 dari Proyeksi SP 2010 *Dinas Kependudukan
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana	*Potensi Desa (Podes) 2019, BPS *Dinas Perhubungan

	transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; atau (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	
<b>C.Aspek Pemanfaatan Pangan</b>		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga Desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di desa	*Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos 2019 *Dinas Kesehatan *Dinas Sosial *Jumlah rumah tangga 2019 dari Proyeksi SP 2010 *Dinas Kependudukan
Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	Jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan dari: 1)Dokter umum/ spesialis 2)Dokter gigi 3)Bidan 4)Tenaga Kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk	*Potensi Desa 2018/ 2019 BPS *Dinas Kesehatan, 2019 *Jumlah penduduk 2018/2019 dari Proyeksi SP 2010 *Dinas Kependudukan 2019

Sumber: Panduan FSVA Kabupaten/ Kota Tahun 2020\

## METODE PENELITIAN

### Metode Penyusunan dan Analisis Data

Lokasi kegiatan Pengukuran Indeks Ketahanan Pangan Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (valid) dan terbaru (update) yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten beserta OPD yang terkait.

Data yang akan digunakan dalam analisis ini berupa data-data sekunder berupa catatan, laporan penelitian, makalah maupun data yang terdapat di instansi pemerintah yang menyajikan studi terdahulu berkaitan dengan subsektor perikanan pada tahun 2019-2020. Pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini dilakukan dengan metode: studi pustaka, FGD (Focus Discussion Group), dan survey.

Analisis yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis terhadap data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang diolah untuk menggambarkan suatu kondisi penelitian tanpa bermaksud menguji hipotesis. Beberapa metode analisis yang akan diterapkan didalamnya yaitu Analisis SWOT, Analisis manajemen strategis untuk menyusun rencana perusahaan dan rencana tindak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek Ketersediaan Pangan

Analisis terhadap produksi tanaman pangan dan umbi-umbian (padi, jagung dan ubi kayu) dilakukan di 24 kecamatan. Ketiga komoditas tersebut dipilih karena merupakan pangan pokok lokal masyarakat Kabupaten Probolinggo.

### **1. Rasio Konsumsi Normatif**

Rasio konsumsi normatif perkapita dihitung dengan membandingkan kebutuhan pangan normatif per gr/ kapita/ hr dengan ketersediaan pangan domestik penduduk per gr/kapita.hr. Untuk Kabupaten Probolinggo rasio konsumsi normatif pangan adalah 88,46 masuk kategori sangat tahan.

### **2. Rasio Luas Baku Sawah dan Ladang**

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah kecamatan. Rasio lahan sawah dan ladang jagung serta ubi kayu terhadap luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Probolinggo sebesar 92,36, sangat tahan. Persebaran lahan sawah dan ladang di Kabupaten Probolinggo tidak merata, hal ini disebabkan kondisi tanah dimasing-masing wilayah. Tetapi hampir semua wilayah kecamatan mempunyai hasil produksi pangan sebagai sumber karbohidrat.

### **3. Sarana Penyedia Pangan**

Sarana dan prasarana penyedia pangan di Kabupaten Probolinggo meliputi toko, warung, swalayan, rumah makan, hotel yang menyediakan restoran, pasar yang didalamnya menjual bahan makanan. Rasio sarana dan prasarana pangan di Kabupaten Probolinggo adalah sekitar 92,49 dengan kategori sangat tahan. Rasio nya sudah sangat tinggi karena di Kabupaten Probolinggo sudah banyak sekali toko sampai ribuan, warung, swalayan yang sudah sampai kecamatan. Untuk pasar sudah ada sekitar 34 unit yang semuanya memiliki toko yang menjual sembako dan bahan makanan lainnya.

## **ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN**

### **1. Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Desil 1 Terhadap Jumlah Penduduk**

Dengan menggunakan data Terpadu PPFM-TNP2K Tahun 2019, maka didapatkan hasil perhitungan rasio jumlah penduduk miskin atau presentase penduduk miskin sebesar 32,32 persen masuk sangat rentan.

### **2. Desa Yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air atau Udara**

Di Kabupaten Probolinggo, hampir semua Desa sudah memiliki akses jalan aspal sehingga membantu akses pangan dapat terdistribusi dengan mudah ke masyarakat. Namun perawatan secara kontinyu masih perlu perhatian untuk menghindari kerusakan jalan yang parah di Desa. Secara infrastruktur kepemilikan jalan aspal hampir semua sehingga didapatkan Indeks Ketahanan sebesar 98,11 termasuk sangat tahan.

## **ASPEK PEMANFAATAN PANGAN**

Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan.

### 1. Akses Air Bersih

Untuk perhitungan rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih disini adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga, akses air bersih di Kabupaten Probolinggo 98,11, sangat tahan. Di Kabupaten Probolinggo sumber air bersih didapatkan dari air kemasan, air ledeng PERUMDAM, sumur gali, sumur pompa, serta sumber tidak terlindung. Untuk pengguna air ledeng PERUMDAM sangat sedikit sekali yaitu sebanyak 28.044 KK dari 371.949 KK atau 7,5 persen saja. Untuk pengguna air dengan sumber tidak terlindung sebanyak 31.989 atau 8,06 persen KK. Tetapi penduduk lebih banyak menggunakan sumur gali dan sumur pompa, sehingga secara ketersediaan air bersih secara data masih mencukupi dengan baik. Namun, untuk sumur gali dan sumur pompa kelemahannya adalah apabila terjadi kemarau panjang akan terjadi kekeringan, disini masalah yang terjadi di Kabupaten Probolinggo mengenai kondisi air bersih, sehingga saat kemarau panjang pemerintah Kabupaten Probolinggo harus melakukan suplay air bersih menggunakan tanki air untuk penduduk Desa.

### 2. Rasio Jumlah Penduduk dengan Tenaga Kesehatan terhadap Kepadatan Penduduk

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 90,87 kategori sangat tahan.

### 3. Stunting

Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak balita (di bawah 5 tahun). Anak yang mengalami stunting akan terlihat pada saat menginjak usia 2 tahun. Stunting merupakan salah satu petunjuk ketidakberhasilan penyerapan gizi pada anak. Di Kabupaten Probolinggo indikator stunting ditunjukkan nilai stunting yaitu 61,61 masuk kategori cukup tahan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu terus mewaspadaai kondisi stunting, meskipun sekarang pada kondisi 16,37 persen yaitu kondisi aman, karena menurut WHO masalah stunting dianggap masalah kesehatan masyarakat apabila sudah diatas 20 persen. Namun dengan selalu memperhatikan asupan gizi pada ibu hamil, bayi dilahirkan, menyusui, dan tumbuh sampai balita akan sangat penting untuk menekan angka stunting.

## INDEKS KOMPOSIT

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dibangun dari beberapa indikator yang terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Data indikator FSVA Kabupaten dengan level desa berasal dari lintas sektor. Metode indeks gabungan (komposit) digunakan untuk merangkum data dari 8 indikator kerentanan pangan sehingga menjadi kesimpulan umum yang berguna dalam pengambilan kebijakan.

Penghitungan Indeks Komposit masing-masing wilayah (Kecamatan) dilakukan dengan rumus:

$$Y_j = a_1X_{1j} + a_2X_{2j} + \dots + a_5X_{5j} + a_6X_{6j}$$

<b>Keterangan:</b>	
<b>Y<sub>j</sub></b>	: Indeks komposit desa ke-j
<b>a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>,... a<sub>6</sub></b>	: Bobot masing-masing indikator
<b>X<sub>1j</sub>, X<sub>2j</sub>,... X<sub>6j</sub></b>	: Nilai masing-masing indikator pada kecamatan ke-j

Hasil perhitungan IKP Kabupaten Probolinggo 8 indikator untuk wilayah Kabupaten yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan menempatkan Kabupaten Probolinggo dengan nilai IKP 71,19. Nilai komposit IKP Kabupaten Probolinggo dari penjumlahan 8 indikator dengan pembobotan didasarkan pada penilaian kemudian dilakukan pemeringkatan prioritas tingkat kerentanan pangan. Wilayah yang masuk ke dalam prioritas 1 adalah wilayah yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada wilayah dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada prioritas 6 merupakan wilayah yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Untuk membentuk klasifikasi, maka digunakan metode konversi yang digunakan dalam penilaian ketahanan pangan. Penilaian perindikator didasarkan pada klasifikasi penilaian komposit sebagai berikut:

**Nilai Komposit dan Prioritas IKP Kabupaten Probolinggo**

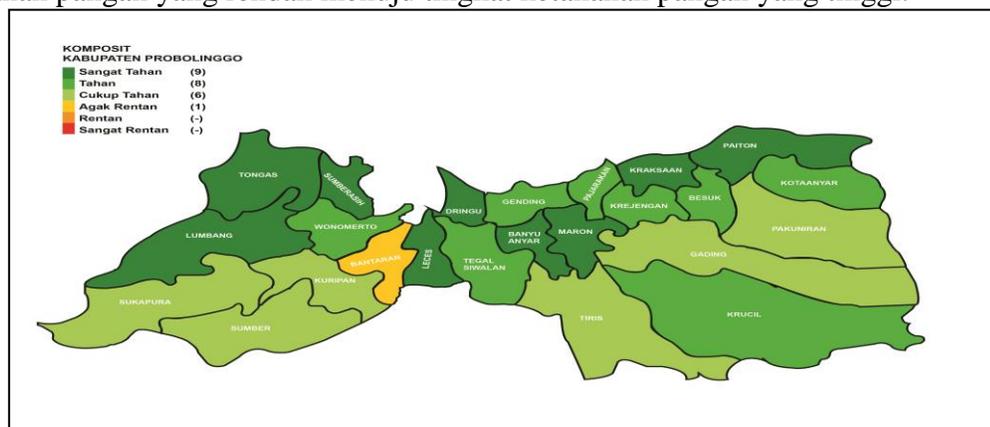
Prioritas	Penilaian Komposit
1	<=16
2	>16-32
3	>32-48
4	>48-64
5	>64-80
6	>=80

**Nilai Indeks Ketahanan Pangan Tingkat Kecamatan Berdasarkan Indikator di Kabupaten Probolinggo**

No	Kecamatan	Indeks Komposit	Penilaian	Prioritas
1	Bantaran	46,71	Agak rentan	3
2	Sukapura	57,50	cukup tahan	4
3	Sumber	49,50	cukup tahan	4
4	Kuripan	54,64	cukup tahan	4
5	Tiris	53,11	Cukup tahan	4
6	Gading	54,39	Cukup tahan	4
7	Pakuniran	62,66	Cuku tahan	4
8	Lumbang	48,18	Cukup tahan	4
9	Tegalsiwalan	77,62	tahan	5
10	Krucil	65,60	tahan	5
11	Kotaanyar	68,10	tahan	5
12	Besuk	79,94	tahan	5
13	Krejengan	77,21	Tahan	5
14	Pajarakan	78,96	Tahan	5
15	Gending	78,28	tahan	5
16	Wonomerto	77,04	tahan	5
17	Leces	83,58	Sanagat tahan	6
18	Banyuanyar	98,75	sangat tahan	6
19	Paiton	81,33	Sangat tahan	6

No	Kecamatan	Indeks Komposit	Penilaian	Prioritas
20	Kraksaan	85,64	Sangat tahan	6
21	Maron	91,27	sangat tahan	6
22	Dringu	84,36	sangat tahan	6
23	Tongas	86,34	sangat tahan	6
24	Sumberkasih	102,49	sangat tahan	6
<b>Kabupaten</b>		<b>71,19</b>	tahan	5

Hasil perhitungan IKP Kabupaten Probolinggo 8 indikator untuk wilayah Kabupaten yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan menempatkan Kabupaten Probolinggo dengan nilai IKP 71,19 masuk kategori tahan (prioritas 5). Berikut adalah peta komposit ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo pada tingkat Kecamatan dengan unit peta adalah peta kecamatan. Gradasi warna dari merah ke hijau menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang rendah menuju tingkat ketahanan pangan yang tinggi.



Gambar Peta Komposit Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo

## ANALISIS POTENSI, PERMASALAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

### Aspek Ketersediaan Pangan

#### 1. Permasalahan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam mencukupi kebutuhan pangan adalah:

- Masih ada Kecamatan yang belum tercukupi kebutuhan pangan normatifnya yaitu di Kecamatan Sukapura masuk dalam prioritas 1 Ketersediaan domestik masih belum mencukupi penduduknya. Ketersediaan Pangan tahun 2019 Kecamatan Sukapura adalah:
  - Padi : 960 ton atau 0,7 % dari ketersediaan Kabupaten
  - Jagung : 92 ton atau 0,05 % dari ketersediaan Kabupaten
  - Ubi Kayu : 295 ton atau 1,04 % dari ketersediaan Kabupaten
- Luas lahan sawah dan lahan jagung serta lahan ubi tidak merata di setiap kecamatan, Kecamatan Sukapura, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Tiris dan Kecamatan Lumbang masuk prioritas 1, Kecamatan Gading, Kecamatan Pakuniran masuk Prioritas 2, Kecamatan Bantaran masuk priortas 3.
- Produksi dan produktivitas tanaman pangan yang belum optimal karena cara budidaya yang kurang sesuai petunjuk, musim yang sulit diprediksi sehingga mempengaruhi hasil panen.

- d. Ada beberapa kecamatan yang kurang memiliki sarana penyedia pangan. Jumlah toko dan pasar yang masih kurang memadai. Kecamatan Kuripan masuk prioritas 1, Kecamatan Bantaran masuk prioritas 2 dan Kecamatan Sumber serta Kecamatan Tegalsiwalan masuk prioritas 3.

## **2. Potensi**

Beberapa potensi yang dimiliki terkait ketersediaan pangan adalah:

- a. Areal sawah dan lahan di Kabupaten Probolinggo yang masih luas dapat dilakukan intensifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan.
- b. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif.
- c. Tersedianya sumber daya untuk membuka pasar dan toko yang menjual saprotan dan hasil pertanian.
- d. Potensi Peternakan yang cukup bisa dikembangkan untuk mendukung penyediaan daging dan telur memenuhi kebutuhan konsumsi.
- e. Potensi perikanan yang masih bisa dikembangkan untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein.

## **3. Peluang**

Beberapa peluang mengembangkan ketersediaan pangan adalah:

- a. Terbukanya peluang usaha agribisnis on farm maupun off farm
- b. Tersedianya teknologi baru yang merata dalam budidaya dan penanganan hasil untuk meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- c. Meningkatnya dukungan kebijakan pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menunjang peningkatan ketersediaan pangan.

## **Tantangan**

Beberapa tantangan yang dihadapi ketersediaan pangan adalah:

- a. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian seperti untuk pemukiman dan industri.
- b. Adanya peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk dan kebutuhan dari luar daerah, menjadi tantangan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan.
- c. Produksi pangan dipengaruhi oleh faktor musim. Perubahan iklim yang tidak menentu dan munculnya berbagai hama dan penyakit tanaman dapat berdampak pada penurunan mutu dan hasil panen.
- d. Membanjirnya produk impor karena dampak globalisasi market dan penjualan online yang semakin mudah.
- e. Semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air, menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya diantara sektor pertanian, industri, dan perumahan.
- f. Menurunnya jumlah petani, peternak dan pembudiaya ikan disebabkan minat untuk bekerja di sektor pertanian dan perikanan yang semakin berkurang, lebih memilih di sektor yang lain.
- g. Peningkatan produksi perikanan menghadapi tantangan ketersediaan air yang kurang terutama pada musim kemarau.

## **Aspek Keterjangkauan Pangan**

## 1. Permasalahan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam mencukupi kebutuhan pangan adalah:

- a. Daya beli masyarakat terhadap bahan pangan terbatas karena kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan Jumlah Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Kecamatan. Ada 14 kecamatan atau 58 persen kecamatan masuk prioritas 1, ada 5 kecamatan atau 20,8 persen masuk prioritas 2 dan ada 4 kecamatan atau 16,67 persen masuk prioritas 3.
- b. Masih ada Desa yang belum mempunyai akses jalan aspal untuk memudahkan transportasi, yaitu :
  - Desa Wonosari Kecamatan Kuripan
  - Desa Batektaman Kecamatan Gading
  - Desa Batur Kecamatan Gading
  - Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih
  -

## 2. Potensi

Potensi yang dimiliki berkaitan dengan keterjangkauan pangan teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Hasil pertanian yang melimpah pada saat panen raya menjadi pendorong terciptanya keterjangkauan harga pangan.
- b. Tersedianya cadangan pangan pemerintah dan lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam dikeluarkan pada saat harga pangan tinggi.
- c. Telah terbentuknya dewan ketahanan pangan dan kelembagaan pangan yang dapat dioptimalkan dalam pengkoordinasian dalam pengendalian harga dan pasokan pangan.

## 3. Peluang

Peluang yang dimiliki berkaitan dengan keterjangkauan pangan teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Banyaknya program pengentasan kemiskinan dari pemerintah yang mengarah pada pengurangan beban penduduk dan bantuan bahan pangan, namun perlu dikordinasikan dengan baik agar tepat sasaran.
- b. Peluang kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka stabilisasi harga pangan pada saat fluktuasi harga tinggi.

## 4. Tantangan

Tantangan yang dimiliki berkaitan dengan keterjangkauan pangan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perilaku pasar dan persaingan usaha yang semakin terbuka dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi harga.

## Aspek Pemanfaatan Pangan

### 1. Permasalahan

Pemanfaatan yang berkaitan dengan aspek pemanfaatan pangan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum meratanya akses air bersih PERUMDAM, Sumber air bersih sumur gali, dan sumur pompa akan mengalami kekeringan di musim kemarau. Kecamatan yang belum

terakses air bersih PERUMDAM yaitu Kecamatan Kuripan, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Paiton, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Pajajaran, Kecamatan Gending dan Kecamatan Pajajaran.

- b. Pemahaman mengenai gizi yang belum merata sampai ke desa, sehingga menyebabkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi dan pangan beragam masih kurang.

## **2. Potensi**

Potensi yang dimiliki berkaitan dengan pemanfaatan pangan teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Pemerataan penggunaan air PERUMDAM atau pemasangan SPAM untuk didistribusikan ke wilayah yang lebih luas
- b. Tersedianya berbagai bahan pangan segar yang melimpah saat musim panen
- c. Tersedianya pekarangan rumah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam penyediaan pangan lokal, pengembangan tanaman pangan, peternakan serta perikanan.

## **3. Peluang**

Peluang yang dimiliki berkaitan dengan aspek pemanfaatan pangan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan perusahaan daerah air minum untuk memanfaatkan sumber air yang ada dan memperluas distribusinya.
- b. Peluang kerjasama dengan perusahaan BUMD, BUMN, maupun PMA yang ada di Kabupaten Probolinggo melalui program CSR (corporate service responsibility) pengadaan air bersih dan penyediaan sarana kesehatan.

## **4. Tantangan**

Tantangan yang dimiliki berkaitan dengan aspek pemanfaatan pangan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Beberapa daerah belum memiliki akses sumber air ledeng, sehingga distribusi air bersih sulit pada saat musim kemarau.
- b. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sangat tergantung dari kuota yang ditetapkan pemerintah pusat
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) akibat dari budaya hidup modern.

## **KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

Dari penjeasan sebelumnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Probolinggo adalah 71,19 berada pada prioritas 5. Hal ini berarti ketahanan pangan sangat memerlukan perhatian seksama dari pemerintah daerah dan masyarakat melalui sinergi program pembangunan ketahanan pangan. Aspek yang diperhatikan tentunya berkaitan dengan bagaimana ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Aspek lingkungan sebagai pondasi dari setiap aktifitas ekonomi dan produksi juga merupakan faktor krusial dari pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan.

Dari analisis yang sudah dilakukan terdapat 8 (33,33%) Kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan, 8 (33,33%) Kecamatan dengan kategori tahan pangan, terdapat 7

(29,27%) Kecamatan masuk kategori cukup tahan, dan terdapat 1(4,17%) masuk kategori agak rentan yaitu Kecamatan Bantaran. Dan tidak ada kecamatan masuk kategori rentan maupun sangat rentan. Hal ini berarti secara general proses mempertahankan ketahanan pangan perlu dilakukan dengan merata di seluruh wilayah, dengan memperhatikan secara spesifik permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi.

Untuk strategi dan arah kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Aspek Ketersediaan Pangan**

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian untuk mendukung swasembada pangan, melalui pengembangan precision and smart agriculture, peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian, permodalan usaha, dan jaringan pemasaran.
- b. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian melalui berbagai pelatihan dan pembinaan kelompok petani.
- c. Meningkatkan pembukaan lahan pertanian pada desa/kelurahan kelompok prioritas 1 dan prioritas 2 (indikator rasio luas sawah terhadap luas wilayah Kecamatan) guna menunjang peningkatan produksi pangan, apabila masih belum memungkinkan maka memberdayakan lahan pekarangan masyarakat sebagai sumber pangan alternatif (tanaman pangan, peternakan dan perikanan darat).
- d. Meningkatkan jumlah embung dan memelihara jaringan irigasi untuk mendukung pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan perbaikan kualitas tata kelola sistem irigasi dengan mengoptimalkan SDM dan kelembagaan pengelola irigasi.
- e. Penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan kelembagaan pangan dan gizi di pedesaan.
- f. Pengembangan inovasi ketahanan pangan keluarga berbasis sumberdaya dan kearifan lokal (pemanfaatan lahan pekarangan dan kemampuan pengolahan dan penyimpanan pangan mandiri).

### **2. Aspek Keterjangkauan Pangan**

Strategi dan arah kebijakan dalam peningkatan keterjangkauan pangan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengendalian dan pemantauan harga pangan, sehingga fluktuasi harga pangan tetap terjaga, dan melakukan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan konsumen agar tingkat inflasi dapat terjaga.
- b. Mengembangkan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas beras dan telur tetapi juga bahan pangan lokal, sayuran, daging, ikan, dan Makanan pendamping Air Susu Ibu (MPASI) bagi keluarga yang memiliki anak bawah dua tahun untuk memenuhi cakupan nutrisi.
- c. Mengembangkan kesejahteraan penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, sehingga memiliki daya beli terhadap bahan pangan.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan BUMN, CSR dan pihak swasta lainnya untuk sama-sama berperan dalam pengentasan kemiskinan (membuka lapangan kerja untuk penduduk lokal, bakti sosial, bantuan kepada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin dan lain-lain).

### **3. Aspek Pemanfaatan Pangan**

Strategi dan arah kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan pangan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal agar kualitas konsumsi pangan lebih baik, melalui advokasi dan komunikasi sosial pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach) dan mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Meningkatkan pemantauan mutu dan keamanan pangan terutama pangan segar dan jajanan anak sekolah
- c. Meningkatkan pengawasan penggunaan bahan berbahaya, pembinaan mutu dan keamanan pangan terhadap produsen dan pedagang pangan secara efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih sehingga akses penduduk terhadap air bersih yang berkualitas baik meningkat sehingga mampu mencegah kesakitan, mampu menyerap makanan dengan baik, dan status gizi individu semakin baik., terutama untuk wilayah-wilayah yang belum terakses PERUMDAM yaitu Kecamatan Kuripan, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Paiton, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Pajajaran, Kecamatan Gending dan Kecamatan Pajajaran.
- e. Penerapan standar pelayanan kesehatan untuk mendorong pemerataan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo tahun 2020 mencapai 71,19 yang menunjukkan sudah melebihi IKP Nasional tahun 2019 yaitu 54,8 dan juga lebih tinggi dari IKP Jawa Timur tahun 2019 yaitu 62,2. Indikator-indikator yang masih rendah (sangat rentan dan di Kabupaten Probolinggo adalah aspek akses pangan yaitu KK miskin.

Hasil identifikasi dan pemetaan IKP tingkat Kecamatan Bantaran masuk kategori agak rentan. Hal ini disebabkan rasio luas baku sawah dan lahan yang agak rentan, penyedia sarana dan prasarana pangan yang masih kurang (rentan), rumah tangga miskin (sangat rentan).

Percepatan penurunan kemiskinan masih sangat perlu di perhatikan pelaksanaan programnya di Kabupaten Probolinggo, untuk mempercepat kondisi perekonomian masyarakat miskin Kabupaten Probolinggo tepat sasaran.

### **Saran**

1. Indikator-indikator IKP yang masih tergolong rendah secara keseluruhan adalah KK Miskin sehingga Kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan akses ekonomi harus ditingkatkan. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian yang menjadi pekerjaan utama masyarakat perlu ditingkatkan, karena selain meningkatkan pendapatan masyarakat dapat membuka kesempatan kerja.

2. Meskipun secara data akses air bersih cukup bagus, namun pemerataan akses air PERUMDAM perlu ditingkatkan untuk memastikan masyarakat tidak kekuarangan air bersih saat terjadi kekeringan atau musim kemarau.
3. Di Kecamatan Bantaran memiliki masalah dengan keterediaan pangan dengan ketersediaan sarana dan prasaranan pangan yang masih kurang, ketersediaan akses jalan masih belum ada data. Peningkatan akses ekonomi dan akses fisik juga harus dipenuhi yaitu ketersediaan toko dan akses jalan.
4. Stunting cukup mempengaruhi aspek penyerapan pangan pada IKP Kabupaten Probolinggo sehingga diperlukan intervensi spesifik seperti PMT bagi Ibu hamil dan menyusui, PMT anak, Kesehatan remaja putri dan ibu pra hamil serta sosialisasi tentang gizi, penganekaragaman makanan dan pola asuh anak selain itu perlu adanya intervensi sensitive berupa peningkatan sanitasi dan layanan air bersih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonymous, 2005. Peta Kerentanan Pangan Indonesia. Dewan Ketahanan Pangan RI dan World Food Programme. Jakarta
- Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian, 2020, Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian
- Badan Pusat Statistik ,2020, Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik, 2020, Kecamatan Dalam Angka, Kabupaten Probolinggo
- Kabupaten Probolinggo, 2019, LKPJ Bupati Probolinggo, Kabupaten Probolinggo
- Maxwell, S. and Frankenberger TR.1992. Household food security: Concepts, Indicators, measurements. A technical review. New York and Rome: UNICEF/ International Fund for Agricultural Development.